

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi (PKPA) yang telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2018 – 5 Januari 2019 di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di Apotek dengan bimbingan dari Apoteker Penanggung Jawab atau Apoteker Praktek, agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan yang sebenarnya.
2. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
3. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan pemahaman mengenai obat-obat agar mampu memberikan pelayanan kefarmasian seperti pelayanan konseling dengan baik dan jelas.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan, peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Lacy, C.F. *et al.* 2009. Drug Information Handbook 17th Ed. American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2006. Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012

Tentang Registrasi Obat Tradisional, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Menteri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2010a, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/ MENKES/ 159/ 2010 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2011, Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/Menkes/per/I/1978

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta.

Seto, S.N. dkk., 2015, Manajemen Farmasi ed. Ke-4, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale, The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Republik Indonesia, Jakarta.